



RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

TAHUN 2011 – 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana

Jl. Gatot Subroto No. 39 Telp. (0284) 321193 Pemalang
Email : bapermas_kb@rocketmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN KELUARGA BERENCANA

PERATURAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 – 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra);
 - b. bahwa dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011 – 2016, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Organisasi Perangkat Daerah Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2016;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

- Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011-2016

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2011-2016

Pasal 2

Rencana strategis (renstra) badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kabupaten pemalang tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Ladasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II Gambaran pelayanan badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

- 2.2. Sumber daya
- 2.3. Kinerja pelayanan
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
- BAB III Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
 - 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah .
 - 3.2. Telaahan renstra K/L dan renstra.
 - 3.3. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
 - 3.4. Penentuan isu-isu strategis
- BAB IV Visi, misi,tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan
 - 4.1. Visi dan misi
 - 4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah
 - 4.3. Strategi dan kebijakan
- BAB V Rencana program kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- BAB VI Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDaerah
- BAB VI Penutup.

Pasal 3

Isi Uraian dan Perincian Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini .

Pasal 4

Peraturan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 September 2011
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELEUARGA BERENCANA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19610022 198702 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Dimana Renstra SKPD merupakan upaya mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah agar dapat bersinergi.

Menyadari pentingnya perencanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Pendek, akan menuntut adanya kewajiban bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk di dalamnya Pimpinan SKPD untuk menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016, dipandang perlu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat akan mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, dimana sistematika Renstra mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010.

Pemalang, 19 September 2011
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang

AUNUROFIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600122 198702 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 4 |
| 1.2. LADASAN HUKUM..... | 5 |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 7 |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN | 7 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI | 9 |
| 2.2. SUMBER DAYA | 15 |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN | 18 |
| 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN | 21 |
| | |
| BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | |
| 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS FUNGSI PELAYANAN | 25 |
| 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 26 |
| 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA..... | 28 |
| 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS..... | 28 |
| 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS..... | 28 |
| | |
| BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN | |
| 4.1. VISI DAN MISI | 30 |
| 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH | 32 |
| 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... | 42 |

| | | |
|--------|--|----|
| BAB V | RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 47 |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... | 54 |
| BAB VI | PENUTUP..... | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan good governance merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya data dan informasi yang lengkap serta memerlukan perlindungan berbagai aspek yang sifatnya makro. Isi data dan informasi yang lengkap dan mutakhir perlu dikaitkan dengan adanya pendekatan perencanaan. Pembangunan sesuai dengan program visi, misi Bupati terpilih, dengan melibatkan semua pihak yang berpengaruh (Stakeholders). Sejalan dengan hal tersebut diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan upaya mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Undang-Undang dimaksud juga menuntut adanya kewajiban konstitusi bagi penyelenggara pemerintah daerah termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana bertujuan untuk memberikan arah, masukan dan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam mengemban tugas tersebut perlu dipersiapkan secara sistematis agar pembangunan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang mempunyai arah, tujuan dan hasil yang jelas, dengan berprinsip pada penyusunan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan mencakup lima prinsip yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah
otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peratur Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005 – 2025.(Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang

Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011
Nomor 5)

1.3. MAKSUD dan TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 ayat 2 menyebutkan arti pentingnya Renstra pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang menyebutkan bahwa Renstra SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang bertujuan untuk memberikan arah, panduan dan pengendalian pelaksanaan program secara berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini juga sebagai penjabaran dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang adalah :

- a. sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- b. sebagai arah tujuan dan hasil yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengamatan pembangunan daerah;
- d. sebagai bahan evaluasi tahun-tahun mendatang, sekaligus merupakan salah satu upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sebagaimana disyaratkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penyelarasan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang SKPD Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;
6. Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD;
7. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 54 Tahun 2008 Bagian Keempat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang mempunyai tugas pokok, fungsi dan struktur sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

2. Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. pembinaan terhadap UPTB dalam lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Sekretariat

- a. Tugas pokok sekretariat adalah mengkoordinasikan program dan pelaksanaan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Fungsi sekretariat meliputi :
 - i. penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan satuan kerja;
 - ii. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - iii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - iv. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- e. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

2) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sarana Prasarana Desa

- a. Tugas pokok bidang ini adalah melaksanakan pemberdayaan ekonomi dan pengembangan sarana dan prasarana desa.
- b. Fungsi :
 - i. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana desa;
 - ii. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana desa;
 - iii. pelayanan penunjang administrasi kepegawaian di bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana desa;

- iv. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana desa;
 - v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun pedoman kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
- d. Subbidang Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sarana dan prasarana desa.
- 3) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Perempuan dan Sosial Budaya
- a. Tugas pokok bidang ini adalah melaksanakan pemberdayaan kelembagaan, perempuan dan sosial budaya.
 - b. Fungsi :
 - i. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan, perempuan, perlindungan anak, keluarga sejahtera dan sosial budaya;
 - ii. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan kelembagaan, perempuan, perlindungan anak, keluarga sejahtera dan sosial budaya;
 - iii. pelayanan penunjang administrasi di bidang pemberdayaan kelembagaan, perempuan, perlindungan anak, keluarga sejahtera dan sosial budaya;
 - iv. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan, perempuan, perlindungan anak, keluarga sejahtera dan sosial budaya;
 - vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Subbidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan masyarakat.

- d. Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga sejahtera dan sosial budaya.
- 4) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa
- a. Tugas pokok bidang ini adalah melaksanakan pemberdayaan pemerintahan desa.
 - b. Fungsi :
 - i. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
 - ii. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
 - iii. pelayanan penunjang administrasi di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
 - iv. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
 - v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Subbidang Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
 - d. Subbidang Kekayaan dan Keuangan Desa mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang kekayaan dan keuangan desa.
- 5) Bidang Keluarga Berencana
- a. Tugas pokok bidang ini adalah melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi serta koordinasi pelayanan keluarga berencana dan pengendalian penduduk.
 - b. Fungsi :
 - i. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
 - ii. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;

- iii. pelayanan penunjang administrasi di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
 - iv. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
 - v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan keluarga berencana.
 - d. Subbidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan keluarga berencana dan pengendalian penduduk.

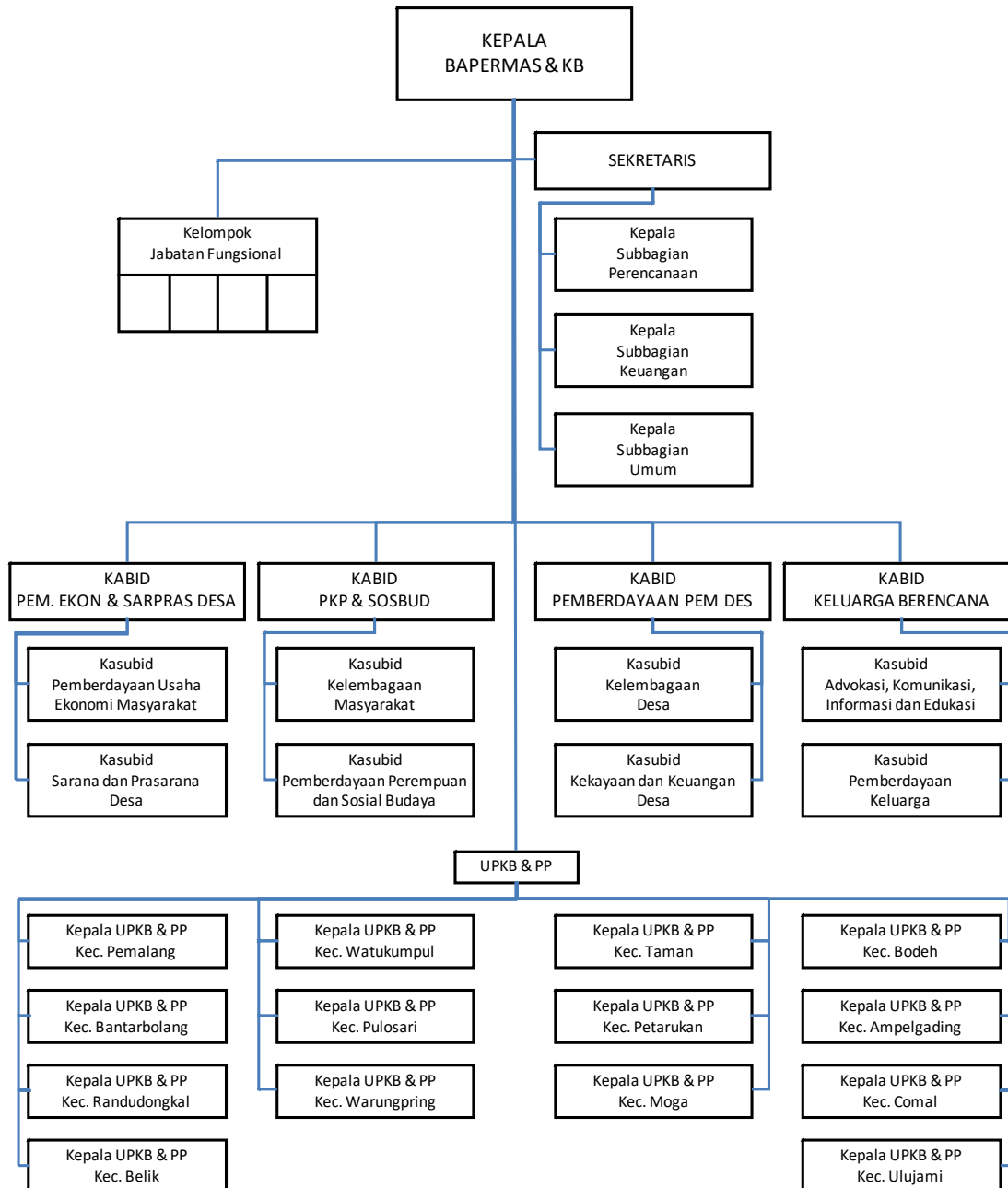
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pematang dan Peraturan Bupati Pematang Nomor 90 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.
- 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sarana Prasarana Desa, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Desa.
- 4. Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan, Perempuan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Subbidang Pemberdayaan Perempuan, dan Sosial Budaya.
- 5. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Subbidang Kelembagaan Desa;

- b. Subbidang Kekayaan dan Keuangan Desa.
- 6. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
- 7. UPKB;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang sebagai berikut :

Bagan 2.1
 Susunan Organisasi
 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
 Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang



2.2. SUMBER DAYA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang mempunyai Sumberdaya Daya Manusia (SDM) sebanyak 150 orang. Dilihat dari komposisi

aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang berdasarkan Pendidikan dan Pangkat / Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Komposisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|--------|--------------------|--------|
| 1. | Strata 2 | 7 |
| 2. | Strata 1 | 51 |
| 3. | Diploma 3 | 13 |
| 4. | Diploma 1 | 6 |
| 5. | SLTA | 65 |
| 6. | SLTP | 5 |
| 7. | SD | 3 |
| JUMLAH | | 150 |

Dari jumlah aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pematang komposisi terbesar berada pada Golongan III, dengan jumlah tertinggi pada Penata.

Tabel 2.2
 Komposisi Aparatur berdasarkan Pangkat dan Golongan

| NO | PANGKAT / GOLONGAN | JUMLAH |
|----|---------------------------|--------|
| 1. | Pembina Utama Muda – IV/c | 1 |
| 2. | Pembina Tk. – IV/b | 4 |
| 3. | Pembina – IV/a | 10 |
| 4. | Penata Tk. I – III/d | 26 |
| 5. | Penata – III/c | 37 |
| 6. | Penata Muda Tk. I – III/b | 35 |
| 7. | Penata Muda – III/a | 11 |
| 8. | Pengatur Tk. I – II/d | 2 |
| 9. | Pengatur – II/c | 5 |

| NO | PANGKAT / GOLONGAN | JUMLAH |
|--------|---------------------------|--------|
| 10. | Pengatur Muda Tk.I – II/b | 1 |
| 11. | Pengatur Muda – II/a | 15 |
| 12. | Juru Tk. I – I/d | 0 |
| 13. | Juru – I/c | 2 |
| 14. | Juru TK. I – I/b | 0 |
| 15. | Juru Muda – I/a | 1 |
| JUMLAH | | 150 |

Dari jumlah aparatur yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang, yang pernah mengikuti diklat, baik struktural maupun fungsional.

Tabel 2.3

Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional

| NO | JENIS DIKLAT | JUMLAH |
|--------|-------------------|--------|
| 1. | Diklat Pim II | 1 |
| 2. | Diklat Pim III | 6 |
| 3. | Diklat Pim IV | 17 |
| 4. | Diklat Fungsional | 84 |
| JUMLAH | | 107 |

2. Perlengkapan

Untuk melaksanakan kegiatan / tugas sehari-hari diperlukan sarana dan prasarana yang ada. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang telah memiliki sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. 2 (dua) ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. 1 (satu) mesin telepon dan faxmille dan jaringan pesawat internal sebanyak 5 (lima) buah guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

- c. Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) buah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di lapangan;
- d. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 122 (seratus sembilan) buah yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan baik oleh intern maupun Penyuluh KB yang berada di 14 (empat belas) kecamatan guna kelancaran kegiatan-kegiatan ke desa binaan masing-masing.
- e. Komputer sebanyak 20 dan 12 printer, masing-masing untuk mendukung kegiatan yang berada pada masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang;
- f. 4 (empat) buah LCD untuk kegiatan masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang yang kemungkinan bersamaan.
- g. 17 (tujuh belas) buah Note Book;
- h. 9 (sembilan) almari besi guna penyimpanan arsip di masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang;
- i. 7 (tujuh) buah filling cabinet guna penyimpanan arsip di masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang;
- j. 15 (lima belas) buah AC Split masing-masing di ruangan Kepala, Sekretaris dan Kepala Bidang , ruang komputer dan ruang pertemuan;
- k. 1 (satu) buah peralatan jaringan komputer guna mengakses informasi baik intern kabupaten maupun ekstern kabupaten.

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi capaian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang. Secara rinci target capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga
Berencana Kabupaten Pematang Jaya

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target IKK | Target Renstra SKPD Tahun ke | | | | | Realisasi capaian akhir Renstra |
|--|---|------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| 11.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 3,07 | 2,68 | 2,7 | 2,9 | 3,01 | 3,04 | 3,07 |
| 11.2. | Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11.3. | Rasio KDRT | 0,010 | (0,018) | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,010 |
| 11.4. | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 11.5. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.6. | Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit) | 38 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 |
| 11.7. | Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) | 15 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 |
| 11.8. | Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%) | 88,7 | 84,6 | 85,4 | 86,3 | 87,1 | 87,9 | 88,7 |
| 2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | | |
| 12.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang) | 2,39 | 2,74 | 2,67 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,39 |
| 12.2. | Cakupan peserta KB aktif (%) | 81,49 | 81,39 | 81,41 | 81,43 | 81,45 | 81,47 | 81,49 |
| 12.3. | Unmetneed | 9 | 14,09 | 12,95 | 11,72 | 10,61 | 9,51 | 9 |
| 12.4. | Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%) | 80,59 | 55,09 | 60,59 | 65,08 | 70,59 | 75,09 | 80,59 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target IKK | Target Renstra SKPD Tahun ke | | | | | Realisasi capaian akhir Renstra |
|-------|--|------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 12.5. | Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang) | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 12.6. | Persentase keluarga Pra Sejahtera/Sejahtera I (%) | 56,17 | 56,47 | 56,41 | 56,35 | 56,29 | 56,23 | 56,17 |
| 12.7. | Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%) | 2,5 | 2,54 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,5 | 2,5 |
| 3. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | |
| 22.1. | Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit) | 222 | 170 | 185 | 195 | 200 | 210 | 222 |
| 22.2. | Persentase PKK aktif (%) | 100 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 22.3. | Jumlah LSM aktif (unit) | 100 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 22.4. | PKK aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22.5. | Persentase Posyandu Aktif (%) | 100 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 22.6. | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
| 22.7. | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang) | 50 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 50 |
| 22.8. | Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok) | 70 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

2.4. TANTANGAN, PELUANG DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA.

Dengan melihat kondisi kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sesuai dengan indikator kinerja mendasari pada tugas dan fungsi SKPD, maka tantangan, peluang dan pengembangan pelayanan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah/legislatif masih rendah;
- b. Partisipasi angkatan kerja perempuan masih sangat sedikit
- c. Belum seluruh kecamatan terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- d. Masih terdapat perempuan buta huruf
- e. Masih tingginya unmetneed KB di Kabupaten Pematang
- f. Rasio PLKB dengan desa/kelurahan belum idial
- g. Masih tingginya jumlah penduduk miskin, peserta keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dibandingkan tahun sebelumnya
- h. Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
- i. Masih sedikitnya jumlah lembaga ekonomi di desa.\kelurahan dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan pendampingan
- j. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Peluang

- a. Terbentuknya Petugas Pos Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Klinik Desa (SKD)
- b. Terbentuknya Jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tidak Kekerasan (Jayandu Widuri)
- c. Berfungsinya Lembaga Masyarakat khususnya LPMD, LPMK, PKK, RT dan RW sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- d. Berfungsinya mekanisme perencanaan dari bawah yaitu dengan musrenbang
- e. Terpenuhinya jumlah aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Pengembangan Pelayanan

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga berencana di lini lapangan
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan
- c. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan proses pengelolaan pembangunan
- d. Mendayagunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk dalam menyelesaikan setiap masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat

Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan keluarga berencana maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana.

a. Ruang lingkup Tugas :

- 1) Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang
- 2) Puskesmas se Kabupaten Pematang
- 3) Klinik KB Pemerintah dan Swasta se Kabupaten Pematang

b. Jenis – jenis Pelayanan

Menyediakan Alat dan Obat Kontrasepsi KB (Alokon) kepada :

- 1) Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang
- 2) Puskesmas se Kabupaten Pematang
- 3) Klinik KB Pemerintah dan Swasta se Kabupaten Pematang

c. Syarat Pengajuan Penyediaan Alokon KB

Mengirim Formulir Pengajuan yang ditandatangani Kepala Rumah Sakit atau Puskesmas / Klinik KB kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang dengan Tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang.

d. Lama Waktu Pengajuan Alokon KB

1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja

e. Biaya

Pengambilan Alokon KB di Gudang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang tidak dipungut biaya dan diambil

sendiri oleh pemohon dan didampingi Kepala UPKB PP masing – masing di kecamatan atau yang ditugaskan.

f. Prosedur Pengajuan

- 1) Pemohon datang sendiri dengan membawa formulir pengajuan yang sudah ditandatangani dan diketahui oleh Kepala UPKB PP kecamatan
- 2) Permohonan dapat disetujui / dipenuhi oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan Stok Alokasi KB yang ada di gudang
- 3) Permohonan dapat dititipkan melalui PLKB / PKB atau Kepala UPKB PP kecamatan
- 4) Pengambilan Alokasi KB diambil sendiri dengan didampingi Kepala UPKB PP masing – masing kecamatan atau yang ditugasi

g. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang diterima oleh Pemohon

- 1) Alat dan Obat Kontrasepsi KB
- 2) Obat Side Effect
- 3) Peralatan Pelayanan
- 4) Obat Non Kontrasepsi
- 5) Formulir Pelaporan Administrasi

h. Tempat dan Waktu Pelayanan

Bertempat di Gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 37 Pematang Telp. (0284) 321193. Waktu : Senin s/d Jum'at, pukul 09.00 – 14.30 WIB (pada jam kerja)

i. Sarana dan Prasarana

- 1) Ruang Tunggu
- 2) WC / Kamar mandi
- 3) Telepon
- 4) Air Mineral
- 5) Parkir

j. Kompetensi Petugas

- 1) Penanggung jawab : 1 orang
- 2) Atasan langsung Pemegang Barang : 1 orang
- 3) Pemegang Barang : 1 orang
- 4) Petugas Administrasi : 1 orang
- 5) Staf : 1 orang

k. Kompensasi

Jika dalam 3 (tiga) hari barang / alokon KB tidak / belum diambil akan dihubungi lewat telepon atau diinformasikan lewat PLKB / PKB dalam wilayahnya atau lewat Kepala UPKB PP masing – masing kecamatan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pematang Bab III Bagian Keempat Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Untuk mendukung tugas Bupati sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan evaluasi dan analisis isu-isu strategis yang ada dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, terutama tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, kualifikasi tenaga kerja dan upah kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Data tahun 2008 diketahui nilai IPG sebesar 64,6 dan IDG sebesar 59,7;
2. Belum optimalnya kelembagaan PUG dan perlindungan anak dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender;
3. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan;
4. Tingginya Unmetneed KB, pada tahun 2010 diketahui sebesar 14,95%;
5. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB, ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alat kontrasepsi MOP dan Kondom (1 – 3%);
6. Masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB (PLKB), prasarana dan sarana pelayanan KB. Banyaknya desa dan kelurahan sebanyak 222 kelurahan/ desa terdapat 74 orang PLKB sehingga masih terdapat kekurangan;
7. Masih tingginya jumlah penduduk miskin, persentase keluarga pra sejahtera (Pra KS) dan sejahtera I (KS I) sebesar 57,11% tahun 2010

dan jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan sebesar 22,17% tahun 2010;

8. Rendahnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa. Hal ini dapat diketahui tingkat ketergantungan masyarakat pada pihak lain masih cukup besar;
9. Kurang berkembangnya kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa. Hal ini disebabkan kapasitas SDM yang masih rendah dan jaringan kemitraan dalam mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif belum sepenuhnya dapat diwujudkan;
10. Kemampuan dan kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal;
11. Kurangnya peran serta masyarakat dan khususnya perempuan dalam setiap tahap pembangunan;
12. Kurang optimalnya peran tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
13. Rendahnya penyediaan pelayanan masyarakat, hal ini dapat diketahui dari dukungan sarana dan prasarana guna pelayanan pemerintahan dalam hal kesehatan, pendidikan dan sosial budaya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Pematang tahun 2011-2016 yaitu : "Kabupaten Pematang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia" .Pencapaian visi "Kabupaten Pematang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia" ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial;
2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan berbasis kompetensi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

5. Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di perdesaan.
6. Mengembangkan kehidupan beragama yang aman, damai, harmonis, toleran dan saling menghormati.

Untuk mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tentunya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, pengaruh tersebut bisa merupakan penghambat dan pendorong dalam pelayanan. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat Pematang yang Sehat, Cerdas, dan Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia khususnya dalam pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender;
2. Masih tingginya keluarga yang masih berada pada fase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I baik berdasarkan alasan ekonomi maupun alasan lain;
3. Belum melembaga dan meningkatnya kualitas dan peran serta dalam pemberdayaan ekonomi dengan penerapan teknologi tepat guna

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pematang diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sampai pada lini yang terendah;
2. Tingkat capaian kesetaraan dan keadilan gender melalui IPG (Indeks Pembangunan Gender) semakin meningkat
3. Dalam rangka meningkatkan peserta KB telah didukung sarana dan prasarana yang ada seperti UPKB PP di setiap Kecamatan, PLKB (Petugas Lapangan KB), PPKBD (Petugas Pembina KB Desa), Mobil Penerangan dan direncanakan Mobil Pelayanan;
4. Telah terbentuknya kelembagaan masyarakat desa/kelurahan atau kelompok-kelompok masyarakat desa/kelurahan secara kuantitatif cukup besar;
5. Peran serta masyarakat khususnya perempuan dalam pelaksanaan pembangunan sudah mulai terlihat;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan, upaya untuk menanggulangi harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Dalam rangka mempercepat program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan keluarga berkualitas dengan pengadaan sarana prasarana operasional di lapangan seperti, pemenuhan gudang alat kontrasepsi, sarana mobilitas tim KB keliling, alat darat bermotor sepeda motor, media sarana promosi dan publikasi KIE KIT dan alat-alat kedokteran, kebidanan dan penyakit kandungan ginekology bed.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang bertujuan untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dipertanian dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam pembangunan tentunya masyarakat harus diberi peran secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk material. Lokasi pemberdayaan meliputi seluruh kecamatan dan desa yang berada di Kabupaten Pematang dengan berpedoman pada tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran kondisi dan hasil identifikasi permasalahan dan telaah visi misi Kabupaten Pematang seperti :

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pematang

2. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja
3. Tingginya jumlah penduduk miskin
4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
5. Masih rendahnya daya saing, akses permodalan usaha dan pemasaran hasil produksi UMKM.

Berdasarkan pada isu-isu strategis tersebut diatas maka isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana pada 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya PUG (Pengarusutamaan Gender) di Kabupaten Pemalang
IPG (Indeks Pembangunan Gender) Jawa Tengah Tahun 2009 Kabupaten Pemalang sudah pada posisi ke 15, sedangkan IPM (Indek Pembangunan Manusia) Jawa Tengah Tahun 2009 Kabupaten Pemalang masih menduduki peringkat ke 23 dan IDG (Indeks Pemberdayaan Perempuan) pada tahun 2007 masih 60,4.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin
Pada tahun 2010 jumlah penduduk Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) masih sebesar Rp. 57,11%
3. Belum optimal peran aktif laki-laki dalam program Kb
Dalam penggunaan alat kontrasepsi MOP (Modus Operasi Pria) pada tahun 2010 masih 4,11%, sedangkan pengguna alkon kondom pada tahun 0,47%
4. Belum seluruh pasangan usia subur mengikuti Keluarga Berencana
Pada tahun 2010 persentase Keluarga Berencana mencapai 81,37%
5. Belum optimalnya peran aktif pemerintahan desa dan kelembagaan desa dalam pembangunan
6. Kekurang berdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
7. Kecenderungan memudarnya sistem nilai sosial budaya sebagai pranata pembentukan perilaku masyarakat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang

4.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang, adalah :

“ Terwujudnya Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Menuju Masyarakat Mandiri”

Adapun makna visi tersebut tersebut diatas dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai perwujudan dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat, agar mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah beserta seluruh stakeholder pemberdayaan masyarakat seperti ikut berKB dan perempuan semakin berdaya dalam pembangunan;
- b. Sebagai perwujudan dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan dan percepatan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pematang secara merata, seperti pengembangan sarana dan prasarana dasar dan ekonomi desa, pemerintahan desa dan kelembagaan desa;
- c. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang dalam perwujudan gambaran di masa yang akan datang yang

ingin dicapai oleh organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang

4.1.2. Misi

Misi yang dirumuskan dalam upaya mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur, dalam rangka pelayanan masyarakat secara prima;
2. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan dan pemberdayaan perempuan dan sosial budaya;
3. Meningkatkan pengembangan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dengan penerapan teknologi tepat guna dan sarana prasarana desa;
5. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk secara tepat.

Adapun makna dari misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Makna dari misi per-tama,

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan perlu adanya pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pada sumber-sumber potensi, sehingga akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

- b. Makna dari misi yang ke-dua,

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, salah satu cara yang paling strategis adalah melalui upaya penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan perempuan dan sosial budaya. Hal tersebut sangat penting karena dengan penguatan kelembagaan akan menguatkan pula berbagai program yang dilaksanakan dilaksanakan di desa;

c. Makna dari misi ke-tiga,

Dalam rangka pengembangan pemberdayaan pembangunan diperlukan penataan kekayaan dan keuangan desa yang diwujudkan dalam penguatan kelembagaan desa, hal tersebut sangat diperlukan agar dalam penyelenggaraan administrasi, pengelolaan keuangan dan aset desa dapat tertib dalam penyelenggaraan dan pemanfaatannya.

d. Makna dari misi ke-empat,

Dalam rangka memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat di Kabupaten Pematang untuk ikut terlibat langsung dalam pemberdayaan ekonomi dan penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan sarana prasarana desa dalam memajukan desa, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga akan membentuk pengetahuan, skill dan attitude manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin maju baik pada tingkat lokal maupun global .

e. Makna dari misi ke-lima,

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang keluarga berencana perlu adanya rumusan sasaran yang cermat dengan mengedepankan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian alat kontrasepsi, agar bisa menciptakan pengendalian penduduk secara tepat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan visi dan misi yang ada. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1 | Meningkatkan semangat pegabdian dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, dalam hal pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 3.125 surat | 3.125 surat | 3.125 surat | 3.125 surat | 3.125 surat |
| | | | 2 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | | 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit |
| | | | 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit |
| | | | 5 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 260 hari | 260 hari | 260 hari | 260 hari | 260 hari |
| | | | 6 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1313 m2 | 1313 m2 | 1313 m2 | 1313 m2 | 1313 m2 |
| | | | 7 | Penyediaan alat tulis kantor | 54 jenis | 54 jenis | 54 jenis | 54 jenis | 54 jenis |
| | | | 8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 9 jenis | 9 jenis | 9 jenis | 9 jenis | 9 jenis |
| | | | 9 | Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis |
| | | | 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| | | | 11 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis |
| | | | 12 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 41 buku | 40 buku | 40 buku | 40 buku | 40 buku |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang Siantar
Tahun 2011 - 2016

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--------|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | 13 Penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | | 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | | 15 Penyedia jasa keamanan | 3 orang | 3 orang | 3 orang | 3 orang | 3 orang |
| | | | 16 Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | Meningkatnya kinerja aparatur | 1 Pembangunan gedung kantor | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung |
| | | | 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis |
| | | | 3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| | | | 4 Pengadaan mebeleur | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit |
| | | | 5 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 9 unit |
| | | | 6 Pengadaan alat-alat elektronik | 1 Unit | 4 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| | | | 7 Pengedaan AC dan Perlengkapannya | | 3 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| | | | 8 Pengedaan Peralatan Kerja | | 4 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 2 Unit |
| | | | 9 Pengadaan lemari besi dan filling kabinet cantor | 15 buah | 15 buah | 15 buah | 15 buah | 15 buah |
| | | | 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 70 m ² | 70 m ² | 70 m ² | 70 m ² | 70 m ² |
| | | | 11 Pembangunan Pagar dan Pembatas lingkungan Kantor | | | | | 1 Buah |
| | | | 12 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang Siantar
Tahun 2011 - 2016

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | 13 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | | 14 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| | | | 15 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis |
| | | | 16 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | | 17 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | | 18 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 185 stel | 185 stel | 185 stel | 185 stel | 185 stel |
| | | | 19 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku |
| | | | 20 | Penyusunan Laporan keuangan Semesteran | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku |
| | | | 21 | Penyusunan data base perencanaan SKPD | 30 buku | 30 buku | 30 buku | 30 buku | 30 buku |
| | | | 22 | Penyusunan Laporan akhir Tahun | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku |
| | | | 23 | Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 3. | Meningkatkan kualitas kelembagaan desa/kelurahan yang ada dan pemberdayaan perempuan dan sosial budaya sebagai mitra agar bisa berperan aktif dalam mengisi pembangunan. | Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan desa/kelurahan | 1 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (PMT-AS) | 176 PKK dan 176 SD | 176 PKK dan 176 SD | 176 PKK dan 176 SD | 176 PKK dan 176 SD | 176 PKK dan 176 SD |
| | | | 2 | Pengembangan model posyandu terpadu | 78 pagu yuban | 144 Pagu yuban | 30 Pagu yuban | 80 Pagu yuban | 30 Pagu yuban |
| | | | 3 | Penyusunan profil desa dan kelurahan | 2.940 buku | 2.940 buku | 2.940 buku | 2.940 buku | 2.940 buku |
| | | | 4 | Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa | 70 Orang | 90 Orang | 90 Orang | 90 Orang | 90 Orang |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke | | | | |
|-----|--------|---|-------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | 5 | Pameran Teknologi Tepat Guna Masyarakat | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg |
| | | | 6 | Peningkatan Peran dan Fungsi BPD | 211 Oran g | 211 Oran g | 211 Oran g | 211 Oran g | 211 Oran g |
| | | | 7 | Pengiriman gelar teknologi tingkat nasional | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg |
| | | | 8 | Fasilitasi Pendataan sarana prasarana desa | | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa |
| | | Meningkatnya ke-serasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan perempuan | 1 | Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 330 orang | 330 orang | 330 orang | 330 orang | 330 orang |
| | | | 2 | Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | | 3 | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan |
| | | | 4 | Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | | 5 | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang
Tahun 2011 - 2016

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--------|---|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | 6 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | 15 materi | 15 materi | 15 materi | 15 materi | 15 materi |
| | | Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan sosial budaya | 1 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 33 unit | 33 unit | 33 unit | 33 unit | 33 unit |
| | | | 2 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 14 kec | 14 kec | 14 kec | 14 kec | 14 kec |
| | | | 3 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | 33 desa | 33 desa | 33 desa | 33 desa | 33 desa |
| | | | 4 Peningkatan Perlindungan hak anak | | 30 FA | 30 FA | 30 FA | 30 FA |
| | | | 5 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan |
| | | | 6 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang |
| | | | 7 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen |
| | | | 8 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan |
| | | | 9 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang |
| | | | 10 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang Jaya
Tahun 2011 - 2016

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--------|---|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | 10 Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan CACAT | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | | 11 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | | 12 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 70 orang | 70 orang | 70 orang | 70 orang | 70 orang |
| | | | 13 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender | 60 Orang | 80 Orang | 60 Orang | 60 Orang | 60 Orang |
| | | | 14 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang |
| | | | 15 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang |
| | | | 16 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang |
| | | | 17 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang |
| | | | 18 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan |
| | | | 19 Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | | 30 IRT | 30 IRT | 30 IRT | 30 IRT |
| | | Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa | 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1.914 stel | 1.914 stel | 1.914 stel | 1.914 stel | 1.914 stel |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang Siantar
Tahun 2011 - 2016

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| | | | 2 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | 140 orang | 140 orang | 140 orang | 140 orang | 140 orang |
| | | | 3 | Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang | 14 kali | 14 kali | 14 kali | 14 kali | 14 kali |
| | | | 4 | Fasilitasi masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan | 8 kasus | 8 kasus | 8 kasus | 8 kasus | 8 kasus |
| 4 | Mendorong desa untuk menertibkan administrasi kegiatan, keuangan dan aset desa menuju desa yang lebih sejahtera | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 | Pelaksanaan Bulan bakti gotong royong masyarakat | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel |
| | | | 2 | Penyusunan mekanisme dan formulasi penyaluran ADD | 250 buku | 250 buku | 250 buku | 250 buku | 250 buku |
| | | | 3 | Pembinaan penggunaan dana ADD | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa |
| | | | 4 | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa |
| | | | 5 | Pembinaan penggunaan dana ADD | 84 desa | 84 desa | 84 desa | 84 desa | 84 desa |
| | | | 6 | Pembinaan perumahan desa yang tidak layak huni | 450 orang | 450 orang | 450 orang | 450 orang | 450 orang |
| | | | 7 | Pembinaan Partisipasi peran serta masyarakat | 13 Kec | 13 Kec | 13 Kec | 13 Kec | 13 Kec |
| | | | 8 | Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan berbasis masyarakat | 400 Rumah | 400 Rumah | 400 Rumah | 400 Rumah | 400 Rumah |
| | | | 9 | Fasilitasi pelaksanaan program pengembangan system pembangunan partisipatif/integrasi | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec |
| | | | 10 | Fasilitasi pelaksanaan program PNPM Paska Krisis | 5 Kec | 5 Kec | 5 Kec | 5 Kec | 5 Kec |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang
Tahun 2011 - 2016

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|-----|--|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| | | | 11 | Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan desa | 6 Desa | 16 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa |
| | | | 12 | Fasilitasi dan Stimulasi pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan | | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg |
| 5. | Meningkatkan sarana dan prasarana desa dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan mekanisme yang berlaku guna membentuk dan meningkatkan kehidupan dan pola pikir yang lebih maju | Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat | 1 | Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga (TNI) dalam pembangunan desa | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec |
| | | | 2 | Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dg pihak ketiga (PNPM-MP) dlm pembangunan desa | 10 Kec | 10 Kec | 10 Kec | 10 Kec | 10 Kec |
| | | | 3 | Fasilitasi pelaksanaan dengan pihak ketiga (P2LDT) dlm pembangunan desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa |
| | | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan | 1 | Pembinaan dan asistensi menjaman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/usaha desa | 40 desa | 40 desa | 40 desa | 40 desa | 40 desa |
| | | | 2 | Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan masyarakat | 444 orang | 444 orang | 444 orang | 444 orang | 444 orang |
| | | | 3 | Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan | 10 desa | 10 desa | 10 desa | 10 desa | 10 desa |
| | | | 4 | Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan | 10 Desa | 15 Desa | 15 Desa | 15 Desa | 15 Desa |
| | | | 5 | Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa |
| | | | 6 | Fasilitasi Lembaga Ekonomi Pedesaan | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa |
| | | | 7 | Review RPJMDesa dan RKPDesa | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 0 | 0 |
| | Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | 1 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (PKPS-BBM) | 12 kec | 12 kec | 12 kec | 12 kec | 12 kec | |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pemalang
Tahun 2011 - 2016

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|----|---|--|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 2 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dari Masyarakat (TTG) | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 20 orang |
| | | | 3 | Koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan desa | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang |
| | | | 4 | Pengadaan buku laporan monografi desa/kelurahan | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg |
| | | | 5 | Pertanggung jawaban akhir masa jabatan kades | 10 Kedes | 171 Kades | 20 Kades | 24 Kades | 25 Kades |
| | | | 6 | Fasilitasi Pengembangan Potensi desa/kelurahan | | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa |
| | | | 7 | Evaluasi rancangan Peraturan Desa dan Kelurahan | | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa |
| | | | 8 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa |
| | | | 9 | Fasilitasi inventarisasi kekayaan / asset desa | | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec |
| | | | 10 | Sertifikasi tanah kas desa | | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa |
| | | | 11 | Pembinaan Pemberian Penghasilan kades dan perangkat desa lainnya | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa | 211 Desa |
| | | | 12 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa |
| | | | 13 | Legislasi Rancangan - an Peraturan Perundang-undangan | 0 | 1 perda | 1 perda | 0 | 0 |
| 6 | Peningkatan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan mengurangi pertumbuhan penduduk secara tepat | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana | 1 | Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin | 1.200 akseptor | 1.200 akseptor | 1.200 akseptor | 1.200 akseptor | 1.200 akseptor |
| | | | 2 | Pengadaan alat kontrasepsi | 230 buah | 230 buah | 230 buah | 230 buah | 230 buah |
| | | | 3 | Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu | 390 orang | 390 orang | 390 orang | 390 orang | 390 orang |
| | | | 4 | Pembinaan Keluarga Berencana | 390 peserta | 390 peserta | 390 peserta | 390 peserta | 390 peserta |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang
Tahun 2011 - 2016

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| | | | 5 | Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling | 6 jenis | 9 jenis | 9 jenis | 6 jenis | 6 jenis |
| | | | 6 | Peningkatan Peran Pria dalam Keluarga Berencana | 280 KB pria | 300 Kb pria | 300 KB Pria | 300 KB Pria | 300 KB Pria |
| | | | 7 | Pembinaan Institusi masyarakat dan KB | | 40 institusi | 40 institusi | 40 institusi | 40 institusi |
| | | | 8 | Pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) | | 20 Poktan | 20 Poktan | 20 Poktan | 20 Poktan |
| | | | 9 | Pelayanan pemasangan kontrasepsi | 490 aseptor | 490 aseptor | 490 aseptor | 490 aseptor | 490 aseptor |
| | | | 10 | Pelayanan KB medis operasi | 499 kasus | 499 kasus | 499 kasus | 499 kasus | 499 kasus |
| | | | 11 | Promosi pelayanan KHIBA | 1.050 orang | 1.050 orang | 1.050 orang | 1.050 orang | 1.050 orang |
| | | | 12 | Penyuluhan penang-gulangan narkoba dan PMS di sekolah | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang |
| | | | 13 | Penyuluhan penang-gulangan narkoba kepada guru BP | 20 Guru BP | 20 Guru BP | 20 Guru BP | 20 Guru BP | 20 Guru BP |
| | | | 14 | Pelatihan tenaga pen-damping kelompok bina keluarga di keca | 280 kelompok | 280 kelompok | 280 kelompok | 280 kelompok | 280 kelompok |
| | | | 15 | Pengumpulan bahan informasi tumbuh kembang anak | 168 orang | 168 orang | 168 orang | 168 orang | 168 orang |
| | | | 16 | Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah | 85 orang | 85 orang | 85 orang | 85 orang | 85 orang |
| | | | 17 | Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang |
| | | | 18 | Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu- | 42 kel | 42 kel | 42 kel | 42 kel | 42 kel |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|-----|--------|--|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga | 1 | Pelayanan KIE | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang |
| | | | 2 | Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi Remaja (KRR) | 1.700 remaja | 1.700 remaja | 1.700 remaja | 1.700 remaja | 1.700 remaja |
| | | | 3 | Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat | 14 kelo mpok | 14 kelo mpok | 14 kelo mpok | 14 kelo mpok | 14 kelo mpok |
| | | | 4 | Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB | 512 kader | 512 kader | 512 kader | 512 kader | 512 kader |
| | | | 5 | Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | 14 unit | 14 unit | 14 unit | 14 unit | 14 unit |
| | | | 6 | Pengelolaan Data dan Informasi Program KB | | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa | 222 Desa |
| | | | 7 | Sarasehan Program KB | | 14 Sarasehan | 14 Sarasehan | 14 Sarasehan | 14 Sarasehan |
| | | | 8 | Pembinaan Kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL dan BLK) | | 14 Klmp | 14 Klmp | 14 Klmp | 14 Klmp |
| | | | 9 | Pelatihan Pengelola kelompok UPPKS di Kecamatan | 14 UPPKS | 28 UPPKS | 28 UPPKS | 28 UPPKS | 28 UPPKS |

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan yang merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang.

Misi Pertama: Meningkatkan kinerja aparatur, dalam rangka pelayanan masyarakat secara prima.

Tujuan : Meningkatkan semangat pegabdian dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, dalam hal pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.

Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya kinerja aparatur;

Misi Kedua: Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan dan pemberdayaan perempuan dan sosial budaya.

Tujuan : Meningkatkan kualitas kelembagaan desa/kelurahan yang ada dan pemberdayaan perempuan dan sosial budaya sebagai mitra agar bisa berperan aktif dalam mengisi pembangunan.

Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan desa/kelurahan.
2. Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
3. Meningkatnya peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan sosial budaya;

Misi Ketiga: Meningkatkan pengembangan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pelayanan kepada masyarakat

Tujuan: Mendorong desa untuk menertibkan administrasi kegiatan, keuangan dan aset desa menuju desa yang lebih sejahtera

Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa.

Misi Keempat: Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dengan penerapan teknologi tepat guna dan sarana prasarana desa

Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana desa dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan mekanisme yang berlaku guna membentuk dan meningkatkan kehidupan dan pola pikir yang lebih maju

- Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan;
3. Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

Misi Kelima: Meningkatkan pembinaan keluarga berencana penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk secara tepat

Tujuan : Peningkatan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan mengurangi pertumbuhan penduduk secara tepat

- Sasaran : 1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana.
2. Meningkatnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang:

Strategi dan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dapat dibedakan per urusan yaitu :

1. Urusan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada :
 - a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - b. Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif.
 - c. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
 - d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam identifikasi perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pelestarian pembangunan
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada :
 - a. Meningkatkan advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi segenap pelaku pembangunan daerah

- b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan sosial budaya
 - c. Meningkatkan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
 - d. Meningkatkan sistem informasi gender dan sosial budaya untuk penyusunan perencanaan pembangunan
3. Urusan keluarga berencana diarahkan pada :
- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana
 - b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap alat kontrasepsi
 - c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas kegiatan ketahanan keluarga

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR

Mendasari dari indikator sasaran pemberdayaan masyarakat, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pematang menjabarkan dengan berbagai program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dan satu tahun transisi yaitu:

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
 - a. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan;
 - b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2);
 - c. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesejahteraan dan keadilan gender (KKG);
 - e. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak;
 - f. Pengembangan sistem informasi gender dan anak;
 - g. Peningkatan perlindungan hak anak;
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - a. Pelaksanaan kegibajan perlindungan perempuan di daerah;
 - b. Pelatihan bagi peltihan (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT;
 - c. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan tindak kekerasan;

- d. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAT);
 - e. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan;
 - f. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT;
 - g. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat;
 - h. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan;
 - b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
 - c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;
 - d. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;
 - e. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan;
 - f. Kegiatan pendidikan dan pelatihan lembaga peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
5. Program keluarga berencana;
- a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
 - b. Pelayanan KIE;
 - c. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu;
 - d. Promosi pelayanan KHIBA;
 - e. Pembinaan keluarga berencana;
 - f. Pengadaan sarana mobilitas Tim KB keliling;
 - g. Pembinaan institusi masyarakat dan kader KB
 - h. Pembinaan kelompok kegiatan (Poktan) KB/KS
6. Program kesehatan reproduksi remaja
- a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR);
 - b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat;
7. Program pelayanan kontrasepsi
- a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB;
 - b. Pengadaan alat kontrasepsi;
 - c. Pelayanan KB medis operasi;

8. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
 - a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB;
 - b. Pengelolaan data dan informasi program KB
 - c. Sarasehan program KB/KS
9. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
 - a. Penyuluhan kesejahteraan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
 - b. Pembinaan kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL dan BLK)
10. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
 - a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
 - b. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah;
11. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah;
 - b. Penyuluhan penanggulangan narkoba kepada guru BP di sekolah.
12. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
13. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
 - a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan;
 - b. Pelatihan pengelola kelompok UPPKS di kecamatan
14. Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
 - a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU;
15. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan
 - c. Fasilitasi inventarisasi kekayaan/aset desa
 - d. Sertifikasi tanah kas desa
 - e. Pembinaan pemberian penghasilan kades dan perangkat desa lainnya
16. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - a. Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat

17. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
18. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - h. Penyediaan alat tulis kantor;
 - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - j. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
 - k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - l. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan;
 - n. Penyediaan makan dan minuman;
 - o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - p. Penyedia jasa keamanan;
 - q. Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan;
19. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pembangunan gedung kantor;
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - d. Pengadaan mebel;
 - e. Pengadaan komputer dan perlengkapannya;
 - f. Pengadaan alat-alat elektronik;
 - g. Pengadaan peralatan kerja;
 - h. Pengadaan almari besi dan filing kabinet;
 - i. Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor;
 - j. Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor;
 - k. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;

- l. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan;
 - m. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
 - n. Pemeliharaan rutin . berkala perlengkapan gedung kantor;
 - o. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor;
 - p. Pemeliharaan rutin/berkala menbeler;
 - q. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya;
20. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - b. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
21. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran
- a. Penyusunan data base perencanaan SKPD;
23. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
- a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (PKPS-BBM);
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat (TTG);
 - c. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
 - d. Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pengembangan model poyandu terpadu;
 - f. Pameran teknologi tepat guna masyarakat desa;
 - g. Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
 - h. Peningkatan peran dan fungsi BPD;
 - i. Pengiriman gelar teknologi tingkat nasional;
 - j. Fasilitasi pendataan sarana prasarana desa.
24. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- a. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan;

- b. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah pedesaan;
 - c. Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan badan usaha milik desa/usaha desa;
 - d. Fasilitasi Lembaga Ekonomi Pedesaan.
 - e. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
25. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
- a. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
 - b. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat;
 - c. Penyusunan profil desa dan kelurahan;
 - d. Penyusunan mekanisme dan formulasi penyaluran ADD;
 - e. Pembinaan penggunaan dana ADD;
 - f. Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa;
 - h. Pembinaan partisipasi dan peran serta masyarakat;
 - i. Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat
 - j. Fasilitasi pelaksanaan program PNPM Paska krisis
 - k. Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa;
 - l. Fasilitasi dan stimulasi pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan
 - m. Fasilitasi pembentukan desa Sikasur
 - n. Fasilitasi review RPJM Desa dan RKP Desa
26. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- a. Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
 - b. Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi desa (inventarisasi aset dan kekayaan desa)
 - c. Pengadaan buku laporan monografi desa/kelurahan
 - d. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa
27. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pembinaan perumahan desa tidak layak huni;

- b. Koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan desa;
- c. Fasilitasi pengembangan potensi desa/kelurahan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana pada Tabel 5.1 (terlampir)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Pemalang, termasuk sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (renstra). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka indikator kinerja yang akan dicapai untuk jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| (1) | Indikator (2) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra (3) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Priode Renstra (9) |
|-----|---|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 2011 (4) | 2012 (5) | 2013 (6) | 2014 (7) | 2015 (8) | |
| 1 | Surat terkirim | 3.125 surat | 3.125 surat | 3.125 surat | 3.125 surat | 3.125 surat | 3.125 surat | 18.750 surat |
| 2 | Telepon, listrik dan air | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 3 | Peralatan dan perlengkapan kantor | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit |
| 4 | Kendaraan dinas/operasional | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit |
| 5 | Administrasi keuangan | 260 hari | 260 hari | 260 hari | 260 hari | 260 hari | 260 hari | 260 hari |
| 6 | Kebersihan kantor | 1313 m ² | 1313 m ² | 1313 m ² | 1313 m ² | 1313 m ² | 1313 m ² | 1.313m ² |
| 7 | Alat tulis kantor | 54 jenis | 54 jenis | 54 jenis | 54 jenis | 54 jenis | 54 jenis | 54 jenis |
| 8 | Barang cetakan dan penggandaan | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis |
| 9 | Peralatan dan perlengkapan cantor | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| 10 | Peralatan rumah tangga | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis |
| 11 | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60 buku | 41 buku | 40 buku | 40 buku | 40 buku | 40 buku | 40 buku |
| 12 | Makanan dan minuman | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang
Tahun 2011 - 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 14 | Petugas keamanan | 4 orang | 5 ob | 3 ob | 3 ob | 4 ob | 5 ob | 5 ob |
| 15 | Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 16 | Pembangunan gedung kantor | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung |
| 17 | Perlengkapan gedung kantor | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis |
| 18 | Peralatan gedung kantor | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| 19 | Mebeleur | 123 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 273 unit |
| 20 | Komputer dan Perengkapannya | 41 unit | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 86 unit |
| 21 | Almari besi dan filling kabinet | 16 buah | 15 buah | 15 buah | 15 buah | 15 buah | 15 buah | 91 buah |
| 22 | Pemeliharaan gedung kantor | 70 m ² | 70 m ² | 70 m ² | 70 m ² | 70 m ² | 70 m ² | 70m ² |
| 23 | Pemeliharaan mobil jabatan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 24 | Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 25 | Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| 26 | Pemeliharaan peralatan gedung kantor | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis |
| 27 | Pemeliharaan mebeleur | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 28 | Pemeliharaan komputer dan perengkapannya | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 29 | Pakaian khusus hari-hari tertentu | 0 | 185 stel | 185 stel | 185 stel | 185 stel | 185 stel | 925 stel |
| 30 | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD | 5 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 130 buku |
| 31 | Laporan Keuangan Semesteran | 5 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 130 buku |
| 32 | Data Base Perencanaan | 1 buku | 30 buku | 30 buku | 30 buku | 30 buku | 30 buku | 151 buku |
| 33 | Laporan Akhir Tahun | 5 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 130 buku |
| 34 | Evaluasi dan Pelaporan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 35 | Lembaga dan Sekolah penerima PMT-AS | 176 desa | 176 PKK dan 176 SD | 176 PKK dan 176 SD | 176 PKK dan 176 SD | 176 PKK dan 176 SD | 176 PKK dan 176 SD | 176 desa dan 176 SD |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang
Tahun 2011 - 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 36 | Model posyandu terpadu | 78 posyandu | 78 paguyuban | 144 Paguyuban | 30 Paguyuban | 80 Paguyuban | 30 Paguyuban | 440 paguyuban |
| 37 | Profil desa dan kelurahan | 0 | 2.940 buku | 2.940 buku | 2.940 buku | 2.940 buku | 2.940 buku | 2940 buku |
| 38 | Sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 330 orang | 330 orang | 330 orang | 330 orang | 330 orang | 330 orang | 1.980 orang |
| 39 | Materi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan | 0 | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 5 kegiatan |
| 40 | Advokasi PUG bagi Perempuan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 12 kegiatan |
| 41 | Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 6 kegiatan |
| 42 | Kegiatan Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 18 kegiatan |
| 43 | Materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender | 15 materi | 15 materi | 15 materi | 15 materi | 15 materi | 15 materi | 15 materi |
| 44 | Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 24 unit | 33 unit | 33 unit | 33 unit | 33 unit | 33 unit | 33 unit |
| 45 | Kapasitas dan jaringan kelembagaan | 14 kec | 14 kec | 14 kec | 14 kec | 14 kec | 14 kec | 14 kec |
| 46 | Informasi Sistem Informasi Gender dan Anak | 33 lokasi | 33 lokasi | 33 lokasi | 33 lokasi | 33 lokasi | 33 lokasi | 33 lokasi |
| 47 | Kebijakan perlindungan perempuan di daerah | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 11 kegiatan |
| 48 | Peserta (TOT) SDM pelayanan korban KDRT | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 360 orang |
| 49 | Sistem perlindungan bagi perempuan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 6 dokumen |
| 50 | Peserta Sosialisasi dan advokasi penghapusan buta aksara | 1 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan |
| 51 | Peserta Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 100 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 1.600 orang |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang
Tahun 2011 - 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 52 | Peserta Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT | 100 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 1.600 orang |
| 53 | Profil perlindungan perempuan lansia dan CACAT | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 6 dokumen |
| 54 | Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 6 kegiatan |
| 55 | Pembinaan organisasi perempuan | 70 orang | 70 orang | 70 orang | 70 orang | 70 orang | 70 orang | 360 orang |
| 56 | Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 720 orang |
| 57 | Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender | 100 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 700 orang |
| 58 | Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 720 orang |
| 59 | Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. | 60 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 660 orang |
| 60 | Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 12 orang |
| 61 | Pakaian dinas beserta perengkapannya | 0 | 1.914 stel | 1.914 stel | 1.914 stel | 1.914 stel | 1.914 stel | 9.570 stel |
| 62 | Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | 211 orang | 140 orang | 140 orang | 140 orang | 140 orang | 140 orang | 911 orang |
| 63 | Aparatur pemerintah desa dalam bidang keuangan desa | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali |
| 64 | Penanganan pengaduan masyarakat | 8 kasus | 8 kasus | 8 kasus | 8 kasus | 8 kasus | 8 kasus | 48 kasus |
| 65 | Bulan bakti gotong royong masyarakat | 222 desa | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel |
| 66 | Mekanisme dan formulasi penyaluran ADD | 250 buku | 250 buku | 250 buku | 250 buku | 250 buku | 250 buku | 1.500 buku |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang
Tahun 2011 - 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 67 | Penggunaan dana ADD | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa | 211 desa |
| 68 | Rumah tidak layak huni | 450 orang | 450 orang | 450 orang | 450 orang | 450 orang | 450 orang | 2.700 orang |
| 69 | Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga (TNI) dalam pembangunan desa | 14 kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 Kec | 14 kec |
| 70 | Pelaksanaan kerjasama dg pihak ketiga (PNPM-MP) dlm pembangunan desa | 10 kec | 10 Kec | 10 Kec | 10 Kec | 10 Kec | 10 Kec | 10 kec |
| 71 | Pelaksanaan dengan pihak ketiga (P2LDT) dlm pem-bangunan desa | 2desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 12 desa |
| 72 | Desa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/usaha desa | 40 desa | 40 desa | 40 desa | 40 desa | 40 desa | 40 desa | 240 desa |
| 73 | Tenaga teknis dan kader pem-berdayaan masyarakat | 444 orang | 444 orang | 444 orang | 444 orang | 444 orang | 444 orang | 2.664 orang |
| 74 | Perlombaan desa dan kelurahan | 10 desa/kelurahan | 10 desa | 10 desa | 10 desa | 10 desa | 10 desa | 60 desa/kel |
| 75 | Lembaga /Organisasi Masyarakat Perdesaan | 12 kec | 12 kec | 12 kec | 12 kec | 12 kec | 12 kec | 12 kec |
| 76 | Peserta Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dari Masyarakat | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 120 orang |
| 77 | Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan desa | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 720 orang |
| 78 | Peserta KB bagi keluarga miskin | 1.200 aseptor | 2.400 akseptor | 2.400 akseptor | 2.400 akseptor | 2.400 akseptor | 2.400 akseptor | 13.200 akseptor |
| 79 | Desa | 211 desa | 0 | 1 desa | 0 | 0 | 0 | 212 desa |
| 80 | Alat kontrasepsi | 230 buah | 230 buah | 230 buah | 230 buah | 230 buah | 230 buah | 680 buah |
| 81 | Ibu hamil resiko tinggi | 230 orang | 390 orang | 390 orang | 390 orang | 390 orang | 390 orang | 2.180 orang |
| 82 | Peserta Keluarga Berencana | 420 peserta | 390 peserta | 390 peserta | 390 peserta | 390 peserta | 390 peserta | 2.370 peserta |
| 83 | Sarana mobilitas tim KB keliling | 3 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 39 jenis |
| 84 | Pemasangan kontrasepsi | 230 aseptor | 250 aseptor | 250 aseptor | 250 aseptor | 250 aseptor | 250 aseptor | 1.460 aseptor |
| 85 | Peserta KB MOP/MOW | 390 peserta | 390 peserta | 390 peserta | 420 peserta | 420 peserta | 420 peserta | 2.460 peserta |
| 86 | Kelangsungan Hidup Ibu Bay1 dan Anak | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel | 222 desa/kel |

Rencana Strategis
Bapermas dan KB Kab. Pematang
Tahun 2011 - 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 87 | Peserta penyuluhan narkoba | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 720 orang |
| 88 | Tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kec | 280 orang | 444 kelompok | 444 kelompok | 444 kelompok | 444 kelompok | 444 kelompok | 444 kelompok |
| 89 | Pengumpul bahan informasi tumbuh kembang anak | 168 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 1.056 orang |
| 90 | Kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah | 280 orang | 85 orang | 85 orang | 85 orang | 85 orang | 85 orang | 705 orang |
| 91 | Ibu hamil resiko tinggi | 168 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 1.278 orang |
| 92 | Kelompok BKB-Posyandu-PADU | 42 kel | 42 kel | 42 kel | 42 kel | 42 kel | 42 kel | 252 kel |
| 93 | Pelayanan KIE | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 222 orang | 1.332 orang |
| 94 | Peserta kesehatan reproduksi Remaja (KRR) | 1.700 remaja | 1.700 remaja | 1.700 remaja | 1.700 remaja | 1.700 remaja | 1.700 remaja | 10.200 remaja |
| 95 | Kelompok peduli remaja | 14 kelompok | 14 kelompok | 14 kelompok | 14 kelompok | 14 kelompok | 14 kelompok | 84 kelompok |
| 96 | Kader peduli KB | 222 kader | 512 kader | 512 kader | 512 kader | 512 kader | 512 kader | 2.782 kader |
| 97 | Pendirian PIK KRR yang terbentuk | 17 unit | 24 unit | 24 unit | 24 unit | 24 unit | 24 unit | 144 unit |
| 98 | Raperda | 0 | 0 | 1 buah | 1 buah | 0 | 0 | 2 buah |
| 99 | RPJMDesa dan RKPDesa | 211 buah | 211 buah | 211 buah | 211 buah | 0 | 0 | 211 buah |

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sekaligus sebagai rujukan penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang yang merupakan tolok ukur penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun dan satu tahun transisi (2011 – 2016).

Renstra disusun sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran penyelenggara pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat. Proses penyusunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun transisi ke depan, dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mengisi pembangunan.

Renstra SKPD merupakan perwujudan akuntabilitas publik yang membutuhkan keterlibatan atau peran serta stakeholder dalam menjamin tercapainya program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dukungan dan peran serta seluruh masyarakat, dunia usaha dan LSM sangat diharapkan demi kemajuan pembangunan.

Pemalang, 19 September 2011
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang

AUNUROFIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600122 198702 1 001

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir | |
|----|---|---|--|---------------|---|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas kelembagaan desa/kelurahan yang ada dan pemberdayaan perempuan dan sosial budaya sebagai mitra agar bisa berperan aktif dalam mengisi pembangunan | Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan desa/kelurahan | | 1 11 15 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya sosialisasi rencana induk pengembangan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak | 1 11 15 03 | 1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Orang | 100 | 100 | 12.5 | 150 | 22 | 150 | 31.5 | 150 | 35 | 150 | 40 | 700 | 141 |
| | | Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan | Terlaksananya jumlah materi dan pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak | 1 11 15 05 | 2 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak | Orang | 34 | 40 | 12.5 | 45 | 33 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 235 | 195.5 |
| | | | | | Jml I | 134 | 140 | 25 | 195 | 55 | 200 | 77 | 200 | 85 | 200 | 95 | 935 | 337 | |
| | | Meningkatnya peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan sosial budaya | | 1 11 16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tercapainya Kebijakan terhadap jumlah kebijakan yang sudah ada sebanyak 2 kebijakan | 1 11 16 01 | 1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan | Kegiatan | 2 | 2 | 10 | 2 | 27 | 2 | 35 | 2 | 40 | 2 | 50 | 10 | 162 |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Rencana Induk Pengembangan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIP PPKPA) | 1 11 16 02 | 2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | Orang | 50 | 50 | 13.75 | 50 | 27 | 50 | 35 | 50 | 40 | 50 | 50 | 250 | 165.75 |
| | | | Peta data dan organisasi dan lembaga masyarakat | 1 11 16 03 | 3 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | Buku | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 20 | 15 | 73 |
| | | | Tercapainya Jumlah materi dan pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak | 1 11 16 04 | 4 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | orang | 100 | 100 | 15 | 100 | 44 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 500 | 209 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhor | |
|----|--------|---------|---|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Terlaksananya orientasi PUG | 1 11 16 05 | 5 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan anak | Forum | 1 | 3 | 12.5 | 14 | 33 | 14 | 40 | 14 | 50 | 14 | 60 | 59 | 196 |
| | | | Terbentuknya jaringan PUG yang terkoordinasi | 1 11 16 06 | 6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | Kegiatan | 2 | 2 | 12.5 | 2 | 33 | 2 | 40 | 2 | 45 | 2 | 50 | 10 | 181 |
| | | | Terpasangnya baliho informasi gender dan anak | 1 11 16 08 | 7 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | Baliho | 100 | 6 | 10 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 35 | 20 | 40 | 86 | 140 |
| | | | Terbentuknya forum anak yang | 1 11 16 09 | 8 Peningkatan perlindungan hak anak | forum anak | 1 | 3 | 40 | 14 | 40 | 14 | 50 | 14 | 50 | 14 | 60 | 59 | 240 |
| | | | | | | Jml II | 259 | 169 | 120 | | 241 | | | 205 | | 205 | | | 1,366 |
| | | | | 1 11 17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi BPD | 1 11 17 01 | 1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | Orang | 80 | 70 | 12.5 | 70 | 20 | 70 | 25 | 70 | 30 | 70 | 35 | 350 | 122.5 |
| | | | Tercapainya Jumlah materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | 1 11 17 02 | 2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | Orang | 60 | 60 | 12.5 | 60 | 20 | 60 | 25 | 60 | 30 | 60 | 35 | 300 | 122.5 |
| | | | Tercapainya Jumlah unit PUG yang diberi materi kesetaraan dan keadilan gender dengan jumlah total unit PUG yang ada | 1 11 17 03 | 3 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan | Kegiatan | 2 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 20 | 2 | 25 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| | | | Terwujudnya jumlah jaringan kelembagaan yang dikembangkan terhadap jumlah jaringan kelembagaan yang diperlukan | 1 11 17 04 | 4 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) | Banner | - | 24 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 20 | 124 | 80 |
| | | | Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 11 17 05 | 5 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | Orang | 40 | 40 | 10 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 20 | 40 | 20 | 200 | 80 |
| | | | Terlaksananya baliho yang dipasang terhadap jumlah tempat strategis di tiap kecamatan dan desa/ kelurahan | 1 11 17 06 | 6 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT | Orang | 75 | 60 | 10 | 60 | 15 | 60 | 15 | 70 | 20 | 70 | 20 | 320 | 80 |
| | | | Terlaksananya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi | 1 11 17 07 | 7 Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat | Kegiatan | 12 | 14 | 6 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 25 | 14 | 25 | 70 | 76 |
| | | | Terlaksananya kebijakan yang dilaksanakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan | 1 11 17 08 | 8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | Kegiatan | 2 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 20 | 2 | 25 | 10 | 85 |
| | | | | | | Jml III | 271 | 272 | 81 | 273 | 125 | 273 | 140 | 283 | 190 | 283 | 210 | 1,384 | 746 |
| | | | | 1 11 18 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir | |
|----|---|---|---|---------------|---|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Terwujudnya pelatih yang telah terlatih terhadap jumlah pelatih | 1 11 18 01 | 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | orang | 60 | 60 | 6 | 60 | 16 | 60 | 20 | 70 | 20 | 70 | 25 | 320 | 87 |
| | | | Terlaksananya kegiatan sistem perlindungan bagi perempuan terhadap kegiatan yang ada | 1 11 18 02 | 2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender | Orang | 75 | 75 | 10 | 75 | 15 | 75 | 20 | 80 | 20 | 80 | 25 | 385 | 90 |
| | | | Terlaksananya kegiatan terhadap kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara | 1 11 18 03 | 3 Kegiatan pendidikan dan pelatihan Lembaga peningkatan peran serta dan kesetaraan gender | Orang | 100 | 100 | 10 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 200 | 100 | 20 | 500 | 260 |
| | | | Terlaksananya kegiatan penyuluhan dalam membangun keluarga | 1 11 18 04 | 4 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. | ibu rumah tangga | 50 | 50 | - | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 | 250 | 140 |
| | | | Terwujudnya pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan | 1 11 18 05 | 5 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan | Peserta | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 75 | 110 |
| | | | Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | 1 11 18 06 | 6 Kegiatan Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Orang | 50 | 50 | - | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 | 250 | 140 |
| | | | | | | Jml IV | 350 | 350 | 36 | 350 | 126 | 350 | 135 | 365 | 350 | 365 | 180 | 1,780 | 827 |
| | Meningkatkan pembinaan keluarga berencana, penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk secara tepat | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana | | 1 12 15 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga | Terselenggaraanya rakor TMKK, HKG Bhayangkara pelayanan KB | 1 12 15 01 | 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin | Orang | 1,200 | 2,400 | 100 | 2,400 | 150 | 2,400 | 150 | 2,400 | 160 | 2,400 | 200 | 12,000 | 760 |
| | | | Tercapainya laporan dari kegiatan yang dilaksanakan | 1 12 15 02 | 2 Pelayanan KIE | Desa/Kelurahan | 222 | 222 | 15 | 222 | 82 | 222 | 90 | 222 | 90 | 222 | 90 | 1,110 | 367 |
| | | | Terwujudnya organisasi perempuan yang dibina terhadap jumlah organisasi perempuan yang ada | 1 12 15 03 | 3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu | Orang | 280 | 42 | 10 | 60 | 44 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 272 | 214 |
| | | | Terwujudnya Masyarakat yang dibina di Desa Binaan | 1 12 15 04 | 4 Promosi Pelayanan KHIBA | kec | 14 | 14 | 15 | 30 | 66 | 14 | 80 | 14 | 90 | 14 | 100 | 86 | 351 |
| | | | Terwujudnya pengurus OW dan PKK yang mengikuti diklat dengan jumlah pengurus yang ada | 1 12 15 05 | 5 Pembinaan Keluarga Berencana | Orang | 444 | 444 | 100 | 444 | 100 | 444 | 100 | 444 | 100 | 444 | 100 | 2,220 | 500 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhor | |
|----|--------|---------|--|---------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Terwujudnya tokoh/kader penggerak KB | 1 12 15 06 | 6 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling | sarpras | 3 | 6 | 1,200 | 9 | 1,500 | 9 | 1,800 | 6 | 2,000 | 6 | 2,000 | 36 | 8,500 |
| | | | Terwujudnya peran pria dalam KB | 1 12 15 07 | 7 Peningkatan Peran Pria dalam keluarga berencana | KB pria | - | 280 | 30 | 300 | 44 | 300 | 50 | 300 | 60 | 300 | 65 | 1,480 | 249 |
| | | | Terlaksananya pembinaan institusi KB | 1 12 15 08 | 8 Pembinaan institusi masyarakat dan kader KB | institusi masyarakat dan kader KB | - | - | - | 40 | 150 | 40 | 160 | 40 | 170 | 40 | 180 | 160 | 660 |
| | | | Terbentuknya Pktan KB/KS | 1 12 15 09 | 9 Pembinaan kelompok kegiatan (Poktan) KB/KS | poktan yang terbina | - | - | - | 20 | 77 | 20 | 80 | 20 | 90 | 20 | 90 | 80 | 337 |
| | | | | | | Jml V | 2,163 | 3,408 | 1,470 | 3,525 | 2,213 | 3,509 | 2,560 | 3,506 | 2,810 | 3,496 | 2,885 | 17,444 | 11,938 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terwujudnya kepedulian remaja tentang Advokasi dan KIE | 1 12 16 01 | 1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Kelompok | 17 | 17 | 30 | 20 | 50 | 20 | 70 | 20 | 70 | 25 | 100 | 102 | 320 |
| | | | Kelompok peduli remaja dalam penyuluh KB | 1 12 16 02 | 2 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat | Anak | 1,700 | 170 | 15 | 180 | 50 | 180 | 60 | 180 | 70 | 180 | 80 | 890 | 275 |
| | | | | | | Jml VI | 1,717 | 187 | 45 | 200 | 100 | 200 | 130 | 200 | 140 | 205 | 180 | 992 | 595 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat kontrasepsi susuk/implan | 1 12 17 01 | 1 Pengadaan alat kontrasepsi | Alat Kontrasepsi | 230 | 230 | 50 | 250 | 70 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | 1,230 | 420 |
| | | | Tercapainya pemasangan kontrasepsi | 1 12 17 02 | 2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB | Peserta KB | 420 | 210 | 15 | 210 | 66 | 210 | 70 | 210 | 80 | 210 | 90 | 1,050 | 321 |
| | | | Tercapainya peserta KB MOP/MC | 1 12 17 04 | 3 Pelayanan KB medis operasi | Peserta KB | 390 | 390 | 250 | 390 | 250 | 420 | 300 | 420 | 300 | 450 | 330 | 2,070 | 1,430 |
| | | | | | | Jml VII | 1,040 | 830 | 315 | 850 | 386 | 880 | 470 | 880 | 480 | 910 | 520 | 4,350 | 2,171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Menurunnya kegagalan / komplikasi terlindungi dibandingkan dgn jumlah kegagalan/ komplikasi yang ada | 1 12 18 01 | 1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB | Desa | 222 | 222 | 40 | 222 | 60 | 222 | 80 | 222 | 80 | 222 | 100 | 1,110 | 360 |
| | | | Terlaksananya pengolahan data K | 1 12 18 08 | 2 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB | Desa | - | - | - | 222 | 145 | 222 | 150 | 222 | 150 | 222 | 150 | 222 | 595 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir | |
|----|--------|---------|--|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Terlaksannya sarasehan KB/KS | 1 12 18 09 | 3 Sarasehan program KB/KS | sarasean | - | - | - | 14 | 60 | 14 | 70 | 14 | 80 | 14 | 90 | 56 | 300 |
| | | | | | | Jml III | 222 | 222 | 40 | 458 | 265 | 458 | 300 | 458 | 310 | 458 | 340 | 1,388 | 1,255 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksana penyuluhan yang dilaksanakan oleh PPKBD | 1 12 19 01 | 1 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat | Orang | 222 | 222 | 15 | 222 | 60 | 222 | 80 | 222 | 80 | 222 | 80 | 1,110 | 315 |
| | | | Terbinanya kelompok catur bina | 1 12 19 02 | 2 Pembinaan kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL dan BLK) | kelompo | - | - | - | 14 | 270 | 14 | 270 | 14 | 270 | 14 | 270 | 56 | 1,080 |
| | | | | | | Jml IX | 222 | 222 | 15 | 236 | 330 | 236 | 350 | 236 | 350 | 236 | 350 | 1,166 | 1,395 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terbentuknya PIK KRR | 1 12 20 01 | 1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR | PIK KRR | 17 | 24 | 20 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 136 | 120 |
| | | | Terlaksana fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah | 1 12 20 02 | 2 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah | Kelompo k | 14 | 85 | 10 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 485 | 240 |
| | | | | | | Jml X | 31 | 109 | 30 | 128 | 75 | 128 | 85 | 128 | 85 | 128 | 85 | 621 | 360 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksannya penyuluhan narkoba dan PMS di sekolah | 1 12 21 01 | 1 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMSdi sekolah | Sekolah | 20 | 800 | 15 | 800 | 50 | 800 | 60 | 800 | 70 | 800 | 80 | 4,000 | 275 |
| | | | Terlaksannya penyuluhan narkoba dan PMS bagi guru BP | 1 12 21 02 | 2 Penyuluhan penanggulangan narkoba kepada guru BP di sekolah | Guru BP | - | 20 | 80 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 40 | 80 | 120 | 340 |
| | | | | | | Jml XI | 20 | 820 | 95 | 820 | 110 | 820 | 120 | 820 | 130 | 840 | 160 | 4,120 | 615 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya data informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak akurat | 1 12 22 01 | 1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Kader | 168 | 222 | 380 | 222 | 390 | 222 | 390 | 222 | 390 | 222 | 390 | 1,110 | 1,940 |
| | | | | | | Jml XII | 168 | 222 | 380 | 222 | 390 | 222 | 390 | 222 | 390 | 222 | 390 | 1,110 | 1,940 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir | |
|----|--|--|--|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 1 12 23 | Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terselenggaranya pelatihan tenaga pendamping Kelompok bina keluarga | 1 12 23 01 | 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan | Orang | 140 | 210 | 15 | 210 | 60 | 210 | 70 | 210 | 80 | 210 | 90 | 1,050 | 315 |
| | | | Terselenggaranya pelatihan tenaga penengelola UPPKS | 1 12 23 02 | 2 Pelatihan pengelola kelompok UPPKS di Kecamatan | UPPKS | - | 14 | 40 | 28 | 80 | 28 | 40 | 28 | 50 | 28 | 60 | 126 | 270 |
| | | | | | | Jml XIII | 140 | 224 | 55 | 238 | 140 | 238 | 110 | 238 | 130 | 238 | 150 | 1,176 | 585 |
| | | | | 1 12 24 | Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terintregasinya kegiatan BKB posyandu dan PAUD yang tertib | 1 12 24 01 | 1 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU | Jumlah Model | 42 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 210 | 200 |
| | | | | | | Jml XIV | 42 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 210 | 200 |
| | Meningkatkan semangat pengabdian dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat | Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran | | 1 20 19 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa | 1 20 19 01 | 1 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa | Desa | - | - | - | 211 | 250 | 211 | 250 | 211 | 250 | 211 | 250 | 211 | 1,000 |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Terfasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan | 1 20 19 04 | 2 Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan | Desa | 211 | 211 | 20 | 211 | 30 | 211 | 30 | 211 | 30 | 211 | 30 | 211 | 140 |
| | | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa | Terfasilitasi inventarisasi kekayaan/aset desa | 1 20 19 06 | 3 Fasilitasi inventarisasi kekayaan/aset desa | Jumlah Aset | - | - | - | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 400 |
| | | Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat | Terwujudnya Sertifikasi tanah kas desa | 1 20 19 07 | 4 Sertifikasi tanah kas desa | Sertifikat | | | | 211 | 600 | 211 | 600 | 211 | 600 | 211 | 600 | 211 | 2,400 |
| | | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan | Terlaksananya Pembinaan Pemberian penghasilan kades dan perangkat desa lainnya | 1 20 19 08 | 5 Pembinaan Pemberian penghasilan kades dan perangkat desa lainnya | Kades dan perangkat | - | 211 | 50 | 211 | 200 | 211 | 200 | 211 | 200 | 211 | 200 | 211 | 850 |
| | | | | | | Jml XV | 211 | 422 | 70 | 858 | 1,180 | 858 | 1,180 | 858 | 1,180 | 858 | 1,180 | 858 | 4,790 |
| | | Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | | 1 20 24 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhor | | |
|----|--------|---------|---|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|----|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) | |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Terfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat | 1 20 24 06 | 1 Fasilitas penanganan pengaduan masyarakat | Kasus | 8 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 8 | 15 | 8 | 15 | 42 | 80 | |
| | | | | | | Jml XVI | 8 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 8 | 15 | 8 | 15 | 42 | 80 | |
| | | | | 1 20 26 | Program penataan peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 20 26 04 | 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Desa | - | 10 | 9 | 10 | 22 | 10 | 40 | 50 | 80 | 50 | 80 | 130 | 231 | |
| | | | Tersusunnya Perda | 1 20 26 05 | 2 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan | buah | - | - | - | 1 | 150 | 1 | 200 | - | - | - | - | 2 | 250 | |
| | | | | | | Jml XVII | - | 10 | 9 | 10 | 22 | 10 | 40 | 50 | 80 | 50 | 80 | 130 | 231 | |
| | | | | 1 22 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tercapainya jumlah surat yang terkirim dengan baik dan benar | 1 22 01 01 | 1 Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat | 3,120 | 3,125 | 5 | 3,125 | 20 | 3,125 | 20 | 3,125 | 20 | 3,125 | 20 | 15,625 | 85 | |
| | | | Terpenuhinya jasa komunikasi listrik dan air | 1 22 01 02 | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bulan | 12 | 12 | 30 | 12 | 55 | 12 | 55 | 12 | 55 | 12 | 55 | 60 | 250 | |
| | | | Tersedianya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 1 22 01 03 | 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Unit | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 60 |
| | | | Terlaksananya Jumlah kendaraan yang terpelihara perizinannya | 1 22 01 06 | 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Unit | 10 | 10 | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 50 | 230 | |
| | | | Terlaksananya Jumlah hari pelayanan jasa administrasi keuangan dari jumlah hari kerja | 1 22 01 07 | 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan | Hari Pelayanan | 260 | 260 | 15 | 260 | 15 | 260 | 15 | 260 | 15 | 260 | 15 | 1,300 | 75 | |
| | | | Terlaksananya Jumlah hari pelayanan jasa kebersihan kantor dari jumlah hari kerja | 1 22 01 08 | 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor | M2 | 1,313 | 1,313 | 3 | 1,313 | 15 | 1,313 | 15 | 1,313 | 15 | 1,313 | 15 | 1,313 | 63 | |
| | | | Tersedianya Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 1 22 01 10 | 8 Penyediaan alat tulis kantor (1 badan dan 14 UPKB & PP) | Jenis | 54 | 54 | 70 | 54 | 150 | 54 | 150 | 54 | 150 | 54 | 150 | 54 | 670 | |
| | | | Tersedianya Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 1 22 01 11 | 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (1 badan dan 14 UPKB & PP) | Jenis | 9 | 9 | 30 | 9 | 60 | 9 | 60 | 9 | 60 | 9 | 60 | 45 | 270 | |
| | | | Tersedianya komponen instalasi listrik | 1 22 01 12 | 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 25 | 85 | |
| | | | Tersedianya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 1 22 01 13 | 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jenis | 4 | 4 | 5 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 36 | 85 | |
| | | | Terpenuhinya peralatan rumah tangga | 1 22 01 14 | 12 Penyediaan peralatan rumah tangga | Bulan | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 37 | 84 | |
| | | | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 22 01 15 | 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | 12 | 5 | 4 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 37 | 64 | |
| | | | Tersedianya makanan dan minuman (1 Bapermas dan 14 UPKB % PP) | 1 22 01 17 | 14 Penyediaan makanan dan minuman (1 Bapermas dan 14 UPKB % PP) | Bulan | 12 | 12 | 40 | 12 | 50 | 12 | 50 | 12 | 50 | 12 | 50 | 60 | 240 | |
| | | | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 22 01 18 | 15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bulan | 12 | 12 | 50 | 12 | 150 | 12 | 150 | 12 | 150 | 12 | 150 | 60 | 650 | |
| | | | Terpenuhinya jasa keamanan | 1 22 01 19 | 16 Penyedia jasa keamanan | Petugas keamanan | 5 | 3 | 17.5 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 98 | |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhor | | |
|----|--------|---------|---|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|-----|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) | |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Terlaksananya koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan | 1 22 01 20 | 17 Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan | Bulan | 12 | 12 | 40 | 12 | 150 | 12 | 150 | 12 | 150 | 12 | 150 | 60 | 640 | |
| | | | | | | Jml XVIII | 4,849 | 4,847 | 349 | 4,857 | 825 | 4,857 | 825 | 4,857 | 825 | 4,857 | 825 | 18,795 | 3,649 | |
| | | | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 22 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terpenuhinya ruang rapat dinas | 1 22 02 03 | 1 Pembangunan gedung kantor | Gedung | 1 | 1 | | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 5 | 1,200 | |
| | | | Tersedianya Jumlah perlengkapan kantor pertahun | 1 22 02 07 | 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jenis | 7 | 7 | 2.5 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 35 | 123 | |
| | | | Tersedianya Jumlah Peralatan Gedung Kantor pertahun | 1 22 02 09 | 3 Pengadaan peralatan gedung kantor | Jenis | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 20 | 163 | |
| | | | Tersedianya Jumlah Mebelair kantor pertahun | 1 22 02 10 | 4 Pengadaan mebeleur | Unit | 30 | 30 | 5 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 150 | 605 | |
| | | | Tersedianya Jumlah komputer dan perlengkapannya yang ada pertahun | 1 22 02 11 | 5 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya | Unit | 9 | 9 | 5 | 9 | 150 | 9 | 150 | 9 | 150 | 9 | 150 | 45 | 605 | |
| | | | Tersedianya alat - alat elektronik | 1 22 02 12 | 6 Pengadaan alat - alat elektronik | alat elektronik | 10 | - | - | 4 | 70 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 10 | 7 | 110 | |
| | | | Terpenuhinya AC dan perlengkapannya | 1 22 02 13 | 7 Pengadaan AC dan perlengkapannya | AC | 15 | - | - | 3 | 65 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 80 | |
| | | | Terpenuhinya peralatan kerja | 1 22 02 14 | 8 Pengadaan peralatan kerja | Peralata | 5 | - | - | 4 | 22 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 41 | |
| | | | Terpenuhinya Lemari Besi dan Filing Kabinet | 1 22 02 15 | 9 Pengadaan Lemari Besi dan Filing Kabinet | Buah | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 75 | 120 | |
| | | | Terlaksana Pembangunan Pagar dan Pembatas lingkungan Kantor | 1 22 02 17 | 11 Pembangunan Pagar dan Pembatas lingkungan Kantor | Pagar pembatas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 |
| | | | Tersedianya Jumlah gedung kantor yang terpelihara | 1 22 02 22 | 12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luas | 70 | 70 | 30 | 70 m2 | 70 | 70 m2 | 70 | 70 m2 | 70 | 70 m2 | 70 | 70 m2 | 310 | |
| | | | Tersedianya Jumlah mobil yang terpelihara | 1 22 02 23 | 13 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Bulan | 12 | 12 | 20 | 12 | 33 | 12 | 33 | 12 | 33 | 12 | 33 | 60 | 152 | |
| | | | Tersedianya Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | 1 22 02 24 | 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bulan | 12 | 12 | 20 | 12 | 50 | 12 | 50 | 12 | 50 | 12 | 50 | 60 | 220 | |
| | | | tersedianya jumlah perlengkapan gedung yang terpelihara | 1 22 02 26 | 15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jenis | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 28 | 52 | |
| | | | Tersedianya Jumlah peralatan kantor terpelihara pertahun | 1 22 02 28 | 16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jenis | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 29 | 52 | |
| | | | Tersedianya Jumlah Mebelair kantor yang terpelihara pertahun | 1 22 02 29 | 17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Bulan | 12 | 12 | 2.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 51 | |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir | |
|----|--------|---------|--|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Tersedianya Jumlah komputer dan perlengkapannya yang terawat pertahun | 1 22 02 30 | 18 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya | Bulan | 12 | 12 | 7 | 12 | 33 | 12 | 33 | 12 | 33 | 12 | 33 | 60 | 139 |
| | | | | | | Jml XX | 224 | 193 | 103 | 137 | 1,079 | 129 | 942 | 130 | 954 | 131 | 1,044 | 650 | 4,122 |
| | | | | 1 22 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terwujudnya bahan pakaian dinas bagi kades/perangkat/BPD | 1 22 03 02 | 1 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya | Stel | - | 185 | - | 185 | 30 | 185 | 30 | 185 | 30 | 185 | 30 | 925 | 120 |
| | | | Tercukupinya pakaian dinas bagi seluruh karyawan yang ada | 1 22 03 05 | 2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Stel | 85 | - | | 185 | 350 | 185 | 350 | 185 | 350 | 185 | 350 | 740 | 1,400 |
| | | | | | | Jml XXI | 85 | 185 | - | 370 | 380 | 370 | 380 | 370 | 380 | 370 | 380 | 1,665 | 1,520 |
| | | | | 1 22 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar pertahun | 1 22 06 01 | 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD | Buku | 25 | 25 | 12.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 125 | 93 |
| | | | Tersedianya laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar pertahun | 1 22 06 02 | 2 Penyusunan Laporan Semesteran | Buku | 25 | 25 | 12.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 125 | 93 |
| | | | Tersedianya laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar pertahun | 1 22 06 04 | 3 Penyusunan Laporan akhir Tahun | Buku | 25 | 25 | 12.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 125 | 93 |
| | | | Tersedianya data dan analisis pelaksanaan program kegiatan | 1 22 06 05 | 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Bulan | 12 | 12 | 60 | 12 | 150 | 12 | 150 | 12 | 150 | 12 | 150 | 60 | 660 |
| | | | | | | Jml XXII | 87 | 87 | 98 | 87 | 210 | 87 | 210 | 87 | 210 | 87 | 210 | 435 | 938 |
| | | | | 1 22 09 | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya data base SKPD | 1 22 09 01 | 1 Penyusunan Data Base Perencanaan SKPD | Dokume | 20 | 20 | 17.5 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 140 | 618 |
| | | | | | | Jml XXIII | 20 | 20 | 18 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 140 | 618 |
| | | | | 1 22 15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (PKPS-BBM) | 1 22 15 01 | 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (PKPS-BBM) | Lembaga | - | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 50 | 290 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhor | | | |
|----|--------|---------|--|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|-----|-----|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) | | |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Tercapainya jumlah orang yang terdidik dan terlatih terhadap jumlah sasaran ditargetkan | 1 22 15 02 | 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dari Masyarakat (TTG) | Desa binaan P2MBG dan PKK | 10 | 10 | 120 | 10 | 120 | 20 | 240 | 20 | 260 | 20 | 280 | 80 | 1,020 | | |
| | | | Terselenggaranya informasi TTG yang didiseminasikan | 1 22 15 03 | 3 Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa | Orang | 60 | 70 | 30 | 90 | 60 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 430 | 390 | | |
| | | | Terlaksanya Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan masyarakat | 1 22 15 04 | 4 Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan masyarakat | Kader desa | 60 | 60 | 85 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 300 | 485 | | |
| | | | Model posyandu terpadu terbentuk | 1 22 15 05 | 5 Pengembangan model posyandu terpadu | Posyand | 78 | 42 | 90 | 144 | 120 | 30 | 30 | 80 | 30 | 40 | 110 | 336 | 380 | | |
| | | | Terselenggaranya pameran teknologi tepat guna masyarakat desa | 1 22 15 06 | 6 Pameran teknologi tepat guna masyarakat desa | Kegiatan | 1 | 1 | 15 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 5 | 715 | | |
| | | | Tercapainya jumlah SD/MI dalam kegiatan PMTAS oleh PKK desa terhadap jumlah SD/MI yang ada | 1 22 15 07 | 7 Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan keluarahan | Jumlah SD/MI | - | 178 | 100 | 176 | 120 | 176 | 120 | 176 | 120 | 176 | 120 | 176 | 120 | 882 | 580 |
| | | | Terjadinya Peningkatan Peran dan Fungsi BPD | 1 22 15 08 | 8 Peningkatan Peran dan Fungsi BPD | Orang | 211 | 211 | 200 | 211 | 250 | 211 | 250 | 211 | 250 | 211 | 250 | 1,055 | 1,200 | | |
| | | | Terpenuhinya Pengiriman gelar teknologi tingkat nasional | 1 22 15 09 | 9 Pengiriman gelar teknologi tingkat nasional | Kegiatan | 1 | 1 | 20 | 1 | 250 | 1 | 50 | 1 | 250 | 1 | 50 | 5 | 620 | | |
| | | | Terfasilitasi pendataan sarana prasarana desa | 1 22 15 10 | 10 Fasilitasi pendataan sarana prasarana desa | sarana dan prasarana | - | - | - | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 844 | 400 | | |
| | | | | | | JML XXIV | 421 | 583 | 710 | 914 | 1,280 | 810 | 1,250 | 860 | 1,470 | 820 | 1,370 | 3,987 | 6,080 | | |
| | | | | 1 22 16 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terfasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan | 1 22 16 05 | 1 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan | desa | - | 10 | 10 | 15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 | 70 | 210 | | |
| | | | Terfasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | 1 22 16 06 | 2 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | desa | - | 10 | 10 | 15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 | 70 | 210 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/ Usaha desa | 1 22 16 08 | 3 Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/ Usaha desa | desa | 10 | 10 | 60 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 50 | 380 | | |
| | | | Terfasilitasi Lembaga Ekonomi Pedesaan | 1 22 16 09 | 4 Fasilitasi Lembaga Ekonomi Pedesaan | lembaga | - | - | - | 5 | 55 | 5 | 55 | 5 | 55 | 5 | 55 | 20 | 220 | | |
| | | | | | | Jml XXV | 10 | 30 | 80 | 45 | 235 | 45 | 235 | 45 | 235 | 45 | 235 | 210 | 1,020 | | |
| | | | | 1 22 17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya musyawarah pembangunan desa | 1 22 17 02 | 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | Desa | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 1,055 | | |
| | | | Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat | 1 22 17 05 | 2 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat | DEsa | 222 | 222 | 75 | 222 | 100 | 222 | 150 | 222 | 150 | 222 | 150 | 222 | 625 | | |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir | |
|----|--------|---------|--|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Tersusunnya profil desa dan kelurahan | 1 22 17 06 | 3 Penyusunan profil desa dan kelurahan | Buku | 444 | 444 | 46 | 444 | 160 | 444 | 200 | 444 | 200 | 444 | 200 | 444 | 806 |
| | | | Terlaksananya Penyusunan mekanisme dan formulasi penyaluran ADD | 1 22 17 07 | 4 Penyusunan mekanisme dan formulasi penyaluran ADD | Dokumen | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | 125 |
| | | | Terpenuhinya Pembinaan penggunaan dana ADD | 1 22 17 08 | 5 Pembinaan penggunaan dana ADD | Desa | 211 | 211 | 300 | 211 | 325 | 211 | 325 | 211 | 325 | 211 | 325 | 211 | 1,600 |
| | | | Terlaksananya Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan | 1 22 17 09 | 6 Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan | Desa/Kelurahan | 6 | 6 | 50 | 6 | 120 | 6 | 150 | 6 | 200 | 6 | 150 | 30 | 670 |
| | | | Terfasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa | 1 22 17 10 | 7 Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa | Desa | 14 | 14 | 140 | 14 | 230 | 14 | 230 | 14 | 230 | 14 | 230 | 70 | 1,060 |
| | | | Terlaksananya Pembinaan partisipasi peran serta masyarakat | 1 22 17 11 | 8 Pembinaan partisipasi peran serta masyarakat | Kecamatan | 10 | 13 | 300 | 13 | 800 | 13 | 800 | 13 | 800 | 13 | 1,000 | 65 | 3,700 |
| | | | Terfasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat | 1 22 17 12 | 9 Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat | Rumah | 2 | 400 | 10 | 400 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | 2,000 | 410 |
| | | | Terfasilitasi pelaksanaan program pengembangan sistem pembangunan partisipatif/Integrasi | 1 22 17 13 | 10 Fasilitasi pelaksanaan program pengembangan sistem pembangunan partisipatif/Integrasi | Kecamatan | 14 | 14 | 3,000 | 14 | 4,000 | 14 | 5,000 | 14 | 6,000 | 14 | 7,000 | 14 | 25,000 |
| | | | Terfasilitasi pelaksanaan program PNPM Paska krisis | 1 22 17 14 | 11 Fasilitasi pelaksanaan program PNPM Paska krisis | Kecamatan | 5 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 150 |
| | | | Terfasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa | 1 22 17 15 | 12 Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa | Desa | - | 6 | 100 | 16 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 82 | 500 |
| | | | Terfasilitasi dan stimulasi pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan | 1 22 17 19 | 13 Fasilitasi dan stimulasi pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan | Kegiatan | 1 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4 | 200 |
| | | | Terfasilitasinya pemekaran desa Sikasur | 1 22 17 20 | 14 Fasilitasi Pembentukan Desa Sikasur | Desa | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 |
| | | | Tersusunnya RPJMDesa dan RKP Desa | 1 22 17 21 | 15 Review RPJMDesa dan RKPDesa | buah | 211 | 211 | - | 211 | 250 | - | - | - | - | - | - | 211 | 250 |
| | | | | | | Jml XXVI | 1,352 | 1,758 | 4,287 | 1,770 | 6,301 | 1,562 | 7,371 | 1,562 | 8,421 | 1,562 | 9,571 | 3,364 | 35,951 |
| | | | | 1 22 18 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | 1 22 18 03 | 1 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Perangkat desa | 211 | 211 | 200 | 211 | 300 | 211 | 300 | 211 | 300 | 211 | 300 | 211 | 1,400 |
| | | | Pelaksanaan Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi desa (Inventarisasi aset dan kekayaan desa) | 1 22 18 05 | 2 Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi desa (Inventarisasi aset dan kekayaan desa) | desa | - | - | - | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 400 |
| | | | buku laporan monografi desa/kelurahan | 1 22 18 06 | 3 Pengadaan buku laporan monografi desa/kelurahan | Kegiatan | 1 | 1 | 10 | 1 | 33 | 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | 60 | 5 | 193 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rereking | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhor | |
|--|--------|---------|---|---------------|---|---------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Target | Juta (Rp) |
| | | | | | | | | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | Target | Juta (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Tersusunnya pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa | 1 22 18 07 | 4 pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa | Jumlah Kades | 1 | 10 | 10 | 171 | 220 | 20 | 30 | 24 | 40 | 25 | 50 | 250 | 350 |
| | | | | | | Jml XXVII | 213 | 222 | 220 | 594 | 653 | 443 | 470 | 447 | 490 | 448 | 510 | 677 | 2,343 |
| | | | | 1 22 20 | Program peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan perumahan desa tidak layak huni | 1 22 20 01 | 1 Pembinaan perumahan desa tidak layak huni | Jumlah Rumah | 200 | 500 | 15 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 2,500 | 415 |
| | | | Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan desa | 1 22 20 03 | 2 Koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan desa | Kecamatan | 12 | 12 | 600 | 12 | 60 | 12 | 60 | 12 | 60 | 12 | 60 | 60 | 840 |
| | | | Terfasilitasi pengembangan potensi desa/kelurahan | 1 22 20 04 | 3 Fasilitasi pengembangan potensi desa/kelurahan | Desa/Kelurahan | - | - | - | 222 | 50 | 222 | 100 | 222 | 100 | 222 | 100 | 222 | 350 |
| | | | | | | Jml XXVI | 212 | 512 | 615 | 734 | 210 | 734 | 260 | 734 | 260 | 734 | 260 | 2,782 | 1,605 |
| Jml I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII | | | | | | | | | 9,315 | 18,159 | 17,536 | 17,707 | 18,740 | 18,026 | 20,490 | 18,033 | 21,795 | 71,613 | 90,536 |

USULAN PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

| NO | KODE REKENING | NAMA PROGRAM / KEGIATAN | DASAR PENGUSULAN |
|----|---|--|---|
| 1. | 1.11.16. a 1.11.16.10 | <u>Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak</u> Peningkatan perlindungan hak anak | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| 2. | 1.12.15 a 1.12.15.08 b 1.12.15.09 c 1.12.15.10 | <u>Program Keluarga Berencana</u> Pembinaan Keluarga Berencana pada Peningkatan Pria dalam KB dan KR Pembinaan Institusi masyarakat dan kader KB Pembinaan kelompok kegiatan (Poktan) KB/KS | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| 3. | 1.12.17 a 1.12.17.06 | <u>Program pelayanan kontrasepsi</u> Pengadaan kontrasepsi dan peralatan medis | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| 4. | 1.12.18 a 1.12.18.04 b 1.12.18.05 | <u>Program pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang mandiri</u> Pengelolaan data dan informasi Program KB Sarasehan program KB/KS | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| 5. | 1.12.19 a 1.12.19.03 | <u>Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat</u> Pembinaan kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL dan BLK) | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| 6. | 1.12.21 a 1.12.21.02 | <u>Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</u> Penyuluhan penanggulangan narkoba kepada guru BP di sekolah | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| 7. | 1.12.23 a 1.12.23.02 | <u>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</u> Pelatihan pengelola kelompok UPPKS di Kecamatan | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| 8. | 1.20.19 a 1.20.19.06 b 1.20.19.07 | <u>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</u> Fasilitasi inventarisasi kekayaan/aset desa Sertifikasi tanah kas desa | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| 9. | 1.22.15 a 1.22.15.08 b 1.22.15.09 | <u>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</u> Pengiriman gelar teknologi tingkat nasional Fasilitasi Pendataan sarana dan prasarana desa | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |

| | | | |
|-----|------------|--|---|
| 10. | 1.22.17 | <u>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</u> | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| a | 1.22.17.14 | Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif dan Integrasi | |
| b | 1.22.17.15 | Fasilitasi pelaksanaan Program PNPM Paska krisis | |
| c | 1.22.17.16 | Fasilitasi pelaksanaan Program PAMSISMAS bidang Monitoring kesinambungan | |
| d | 1.22.17.17 | Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa | |
| 11. | 1.22.18 | <u>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</u> | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| a | 1.22.18.07 | Bintek Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes | |
| b | 1.22.18.08 | Pembinaan Pemberian penghasilan kades dan perangkat desa lainnya | |
| 12. | 1.22.20 | <u>Program peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat</u> | Menyesuaikan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi |
| a | 1.22.10.05 | Fasilitasi Pengembangan potensi desa/kelurahan | |